



# Implikasi Politik Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Negara di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia

Lasma Sinambela<sup>1</sup>, Ismaidar<sup>2</sup>, Tamaulina Br Sembiring<sup>3</sup>  
Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Pembangunan Panca Budi  
[rejeki1976baru@gmail.com](mailto:rejeki1976baru@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: 10 November 2024

Revised: 10 November 2024

Accepted: 12 November 2024

### Keywords:

Impikasi Politik,  
Pertanggungjawaban pidana,  
Penyalahgunaan dokumen  
negara

### Correspondence:

Lasma Sinambela

[rejeki1976baru@gmail.com](mailto:rejeki1976baru@gmail.com)

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan dokumen negara dalam konteks kasus yang terjadi di Imigrasi Polonia, Medan. Dokumen negara, sebagai instrumen resmi yang memiliki kekuatan hukum, sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji regulasi hukum yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta pendekatan empiris melalui studi kasus di Kantor Imigrasi Polonia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dokumen negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melibatkan pemalsuan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran prosedural. Pelaku penyalahgunaan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen atau pasal lain yang relevan, tergantung pada konteks kasus. Studi kasus di Imigrasi Polonia mengungkap adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan kurangnya pemahaman petugas terhadap prosedur yang benar, yang berkontribusi pada terjadinya penyalahgunaan dokumen. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan internal, peningkatan pelatihan petugas imigrasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, integritas dokumen negara dapat terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat ditingkatkan.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



## Pendahuluan

Mengidentifikasi ketentuan hukum pidana yang mengatur penyalahgunaan dokumen negara termasuk pasal-pasal dalam KUHP dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam hal ini secara spesifik kasus ialah kelalaian menghilangkan paspor sebagai dokumen negara. Adapun sanksi yang diberikan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dokumen sehingga mengakibatkan kelalaian berindikasi Tindak Pidana (Puspitasari, 2020) penelusuran kasus fakta hukum berdasarkan data kasus di kantor Imigrasi Polonia Medan terkait peraturan administrasi melengkapi KTP, KK, Ijazah/ Buku Nikah wajib di bawa untuk kelengkapan pelayanan dalam pembuatan paspor dimana jika tidak ada salah satunya akan menimbulkan masalah. Kemudian masalah kelalaian yang sering timbul di kantor Imigrasi ialah kelalaian dalam menjaga dokumen negara/ menghilangkan paspor, sebab kehilangan paspor dianggap akan timbul pemalsuan atau tidak pidana dengan menggunakan paspor yang kita anggap hilang, dengan demikian diwajibkan kita membuat laporan kehilangan di Polrestabes sesuai Wilayah pada kartu identitas

Latar belakang ketentuan hukum atas kelalaian tersebut disebabkan banyaknya jumlah kehilangan atau kelalaian dalam menjaga identitas sehingga timbul tindak kriminal seperti pemalsuan data oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan data orang lain untuk mengambil kesempatan seperti pencurian akses ke bank dengan transaksi local maupun transaksi internasional.

Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian juga menjadi pertanggungjawaban pihak imigrasi (Ambat & Sulistyowati, 2022)

Imigrasi adalah suatu perjalanan manusia dalam lalu lintas memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia dan pengawasan dalam rangka mempertahankan kedaulatan nasional itu sendiri. Ketentuan ini tidak hanya

berlaku untuk orang Indonesia, tetapi juga untuk warga negara asing yang ingin memasuki atau meninggalkan Wilayah Indonesia. Pada suatu Negara, tentunya akan mendapati orang-orang yang berstatus warga negara dan penduduk, serta ada pula penduduk yang tidak berstatus sebagai warga negara. Adanya perbedaan kedudukan dan status tersebut menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing individu. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan timbulnya dampak pada individu tersebut untuk tunduk pada hukum suatu negara serta memiliki pertalian hukum pada negara yang bersangkutan (Ambat & Sulistyowati, 2022)

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah:

1. Pentingnya perlindungan dokumen negara (Monoarfa, 2021)
2. Analisis hukum terhadap kasus, termasuk pasal-pasal yang relevan
3. Mengkaji pertanggungjawaban Pidana dalam menguraikan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku, baik dari sisi pelaku utama maupun pihak lain yang terlibat (pejabat imigrasi atau pengguna dokumen palsu)

## Kajian Pustaka

Beberapa kasus serupa terkait kasus di kantor Imigrasi ialah tentang kebijakan keimigrasian di Indonesia yaitu kebijakan selektif (selective policy) yang menegaskan penegakan hukum perbatasan, ketentuan masuk ke wilayah Indonesia. Dalam penjelasan ini menjelaskan bahwa orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif. Prinsip ini, hanya orang-orang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat diizinkan masuk atau ke luar wilayah Indonesia. (Syahrin, 2019)

Hasil penelitian ini dikaitkan dengan teori-teori dalam ilmu politik, seperti:

1. Teori Patronase dan Klientelisme  
Hubungan saling menguntungkan antara elite politik dan pejabat birokrasi yang memungkinkan terjadinya praktik penyalahgunaan.
2. Teori Korupsi Birokrasi  
Menjelaskan bagaimana kelemahan sistem birokrasi dalam pengawasan dan transparansi menciptakan peluang penyalahgunaan dokumen.
3. Teori Kekuasaan  
Politik kekuasaan yang digunakan untuk menekan birokrasi agar mematuhi kepentingan elite politik atau pihak tertentu.

## Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (analisis undang-undang) dan empiris (kasus nyata).

Penelitian hukum normatif (juga disebut penelitian doktrinal) berfokus pada analisis norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, atau putusan pengadilan.

Ciri-Ciri Penelitian Hukum Normatif:

1. Menggunakan bahan hukum sebagai objek utama penelitian, seperti:
  - o Peraturan perundang-undangan.
  - o Dokumen hukum resmi (putusan pengadilan, konvensi internasional, dll.).
  - o Literatur hukum atau doktrin yang relevan.
2. Tidak menggunakan data empiris, seperti wawancara atau observasi.
3. Tujuan utama adalah menganalisis konsistensi, kejelasan, dan penerapan hukum.

Tabel 1. Data Konsumen Pelayanan Imigrasi

Tahun	Penerbitan Pasport
-------	-----------------------

2022	1.174.411
2023	5.053.315
Total	

Sumber: Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian:  
dit.sistik@imigrasi.go.id

## Hasil Dan Pembahasan

Studi kasus pada Kantor Imigrasi Polonia Medan mengungkapkan beberapa temuan penting terkait penyalahgunaan dokumen negara:

1. Penyalahgunaan dokumen negara, terutama paspor dan visa, dilakukan dengan cara pemalsuan data, pengubahan dokumen resmi, dan penggunaan dokumen oleh pihak yang tidak berhak. Beberapa kasus melibatkan kolusi antara oknum petugas imigrasi dengan pihak luar
2. Prosedur pengawasan yang tidak ketat serta kurangnya pemanfaatan teknologi untuk verifikasi dokumen membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Sistem manual yang digunakan pada beberapa tahap proses administrasi menjadi celah utama.
3. Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan negara dari segi finansial tetapi juga mencederai reputasi Kantor Imigrasi sebagai institusi yang seharusnya menjaga integritas dokumen negara.
4. Proses hukum yang diambil terhadap pelaku cenderung lambat, dengan adanya kasus yang berakhir hanya pada sanksi administratif bagi oknum petugas.

## Pembahasan

### 1. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan Pasal 263 dan 264 KUHP, tindakan pemalsuan dokumen negara dapat dijerat dengan pidana penjara hingga enam tahun. Dalam kasus ini, pelaku yang terbukti menyalahgunakan dokumen resmi dapat dijerat dengan pasal tersebut. Namun, penerapan pasal ini memerlukan pembuktian yang kuat terkait niat jahat (*mens rea*) dan tindakan melawan hukum (*actus reus*). Pada studi kasus di Imigrasi Polonia, pelaku dari pihak internal dapat pula dijerat dengan Pasal 52 KUHP terkait penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa aparat negara yang melanggar hukum harus mendapatkan sanksi yang lebih berat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional. (Arifin & Nurkumalawati, 2020)

### 2. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan

- Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan: Petugas yang tidak memahami pentingnya prosedur kepatuhan lebih rentan melakukan pelanggaran, baik sengaja maupun tidak sengaja.
- Motivasi Ekonomi dan Tekanan Pihak Luar: Beberapa pelaku mengaku termotivasi oleh tekanan finansial atau iming-iming keuntungan besar dari pihak eksternal.
- Sistem dan Teknologi yang Tidak Memadai: Sistem manual yang digunakan dalam beberapa proses administratif mempermudah pemalsuan dokumen tanpa terdeteksi. (Alamsyah & Bahari, 2019)

### 3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan

- Penguatan Sistem Pengawasan: Implementasi sistem teknologi berbasis digital untuk verifikasi dokumen secara otomatis dapat mengurangi peluang penyalahgunaan.
- Peningkatan Pelatihan dan Kesadaran: Pelatihan rutin bagi petugas imigrasi mengenai prosedur hukum dan pengawasan internal sangat penting untuk mencegah pelanggaran.
- Penegakan Hukum yang Tegas: Sanksi pidana harus diterapkan secara tegas untuk memberikan efek jera, termasuk pada oknum petugas yang terlibat. (Monoarfa, 2021)

### 4. Implikasi Sosial dan Hukum

Penyalahgunaan dokumen negara memiliki implikasi serius, termasuk menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Penegakan hukum yang lemah juga dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran hukum adalah hal yang biasa terjadi di lembaga negara. Oleh karena itu, pembenahan sistem secara menyeluruh merupakan kebutuhan mendesak. (Amien & Wijaya, 2022)

## Penutup

Penanganan penyalahgunaan dokumen negara memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, penerapan teknologi, serta penegakan hukum yang konsisten. Studi kasus di Imigrasi Polonia Medan menunjukkan bahwa sinergi antara pengawasan internal dan sanksi hukum dapat menjadi langkah awal dalam mencegah kasus serupa di masa depan.

## Referensi

- Alamsyah, & Bahari. (2019). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Keimigrasian. *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Keimigrasian*, 126(1).
- Ambat, F. Y., & Sulistyowati, T. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN KEIMIGRASIAN YANG SAH. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(2). <https://doi.org/10.25105/refor.v4i2.13605>
- Amien, J. el, & Wijaya, B. A. A. (2022). Peran Imgrasi Dalam Melakukan Pencegahan Keimigrasian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Media Bina Ilmiah*, 17(2).
- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262>
- Monoarfa, K. (2021). SANKSI ATAS PELANGGARAN IJIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. *LEX ET SOCIETATIS*, 9(1). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32057>
- Puspitasari, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Yang Berindikasi Tindak Pidana (Studi Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar). *Tesis*.
- Syahrin, M. A. (2019). POLARISASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN KONTEMPORER: AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1). <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.93>